



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI  
(BIDANG: ENERGI, RISET DAN INOVASI, SERTA INDUSTRI)**

---

Tahun Sidang	:	2022 – 2023
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 28 (Dua Puluh Delapan)
Jenis Rapat	:	Rapat Audiensi
Dengan	:	DPRD Prov. Sulsel
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 20 September 2022
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB s.d 13.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	:	Audiensi
Ketua Rapat	:	H. Andi Ridwan Wittiri (Anggota Komisi VII DPR RI/ F.PDI Perjuangan)
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	:	A. Pemerintah 1. DPRD Prov. Sulsel B. 3 Orang Anggota dari 51 Orang Anggota Komisi VII DPR RI terdiri dari: 2 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 1 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 48 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

## I. PENDAHULUAN

1. Rapat Audiensi Komisi VII DPR RI pada Hari Selasa, 20 September 2022 dibuka pukul 11.30 WIB, dipimpin oleh H. Andi Ridwan Wittiri, selaku Ketua Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Audiensi Komisi VII DPR RI dengan acara:
  - Audiensi

## II. CATATAN RAPAT

1. Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan telah mendengarkan aspirasi dari masyarakat Sulawesi Selatan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama unsur Mahasiswa dan elemen masyarakat di Sulawesi Selatan terkait kenaikan harga BBM khususnya jenis Pertalite.
2. Beberapa poin aspirasi yang disampaikan, antara lain:
  - a. Kenaikan harga BBM memberi dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat kecil
  - b. Badko HMI Sulselbar bersama unsur aliansinya merekomendasikan, antara lain:
    - 1) Memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM
    - 2) Membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis tertentu seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistic. Pembatasan BBM bersubsidi ini harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sector industry, pertambangan dan perkebunan
    - 3) Mengalokasi pendapatan yang besar (*windfall income*) dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global seperti batubara dan sawit untuk menyalurkan subsidi BBM dan listrik
    - 4) Melakukan percepatan realokasi anggaran belanja kementerian/Lembaga yang tidak produktif untuk menyalurkan subsidi BBM

- 5) Mendorong percepatan transisi energi fosil ke Energi Baru Terbarukan (EBT) yang lebih ramah lingkungan sebagai solusi ketahanan energi jangka Panjang.
  - c. Unsur buruh menyampaikan 2 (dua) tuntutan yaitu; 1. Pencabutan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan 2. Menolak kenaikan harga BBM karena sangat memberatkan pekerja buruh,
  - d. Serikat Mahasiswa Penggiat Konstitusi mengusulkan agar di bentuk Panitia Kerja (Panja) tentang kenaikan BBM
3. Anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Badko HMI Sulselbar dan aliansinya serta unsur lainnya terkait masalah kenaikan BBM, penggunaan jalan umum untuk kegiatan penambangan, keberlanjutan KK PT Vale Tbk, dsb dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian/Lembaga/BUMN terkait.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 13.00 WIB

Jakarta, 20 September 2022

**KETUA RAPAT,**



**H. ANDI RIDWAN WITTIRI**

**A-256**